

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SMAN 03 SEMARANG

Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi.

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus segera diperangi bersama.

Fenomena korupsi yang sudah membudaya bagi masyarakat Indonesia, ditambah akhir-akhir ini banyak generasi yang hanya "gandrung" akan budaya pragmatis, hedonis, dll., yang menyebabkan carut marutnya pemerintahan, berbanding terbalik jika dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sulit masuk di negara kita yang notabene disebut bangsa yang religius, artinya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Korupsi dapat membuat orang kaya dalam sesaat, korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Korupsi berarti mengambil jatah orang lain, atau dapat diartikan mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. untungnya korupsi adalah tidak dikategorikan ke dalam kategori PEKAT

(penyakit masyarakat) sehingga pejabat yang korup tidak pernah takut terkena razia dari kelompok-kelompok yang anti Pekat atau FPI (Fron Pembela Islam) yang sering dikategorikan ke dalam Pekat dan harus dirazia hanyalah pekerja seks, minuman keras, dan judi. Inilah untungnya menjadi koruptor di Indonesia: sudah pasti kaya dan tidak perlu takut dirazia oleh warga yang lain. Warga yang lain tidak pernah merasa resah bila ada seorang pejabat atau anggota DPR yang memiliki rumah dan mobil mewah melampaui takaran gajinya sebagai pejabat public. Tapi cepat tersentak bila melihat warung remang-remang tempat mangkalnya pekerja seks komersial (PSK) atau main kartu.

Konsekuensi dari pandangan masyarakat yang ambivalen melihat masalah korupsi itu adalah sampai sekarang korupsi masih dianggap sebagai persoalan hukum semata, tidak pernah dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat luas sehingga harus diperangi secara serius. Hal itu tampak jelas dari opini yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tergantung pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya di tekankan pada aspek kognitif saja dan

pendidikan agama islam harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.

Banyak kalangan yang mempertanyakan keberhasilan pendidikan agama di sekolah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan : (1) rendahnya minat dan kemauan untuk belajar agama, (2) rendahnya kesadaran mengamalkan ibadah, (3) rendahnya kemampuan baca tulis al-Quran, (4) berperilaku bertentangan dengan ajaran agama yang dianut seperti melakukan tindak kriminal, anarkhis, premanisme, perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, narkoba, dan lain-lain, (5) masih meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor kemasyarakatan. Bahkan terjadinya krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia sesungguhnya berpangkal pada krisis akhlak atau moral. Krisis ini oleh sementara pihak dianggap sebagai kegagalan pendidikan agama

Kalau kita menilik pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Nilai-nilai tersebut mengharuskan adanya usaha sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan agama yang sebaik-baiknya kepada generasi muda. Sasaran yang ingin dicapai bukan hanya lahirnya anak Indonesia yang sekedar kuat penalarannya dan sehat jasmaninya, tetapi manusia utuh yang kuat pribadinya dan berakhlak mulia. Tujuan ini akan dapat tercapai jika pendidikan agama dapat diberikan secara tepat dan benar. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalan ajaran agama menjadi tuntutan serius, dan sekaligus menjadi ukuran berhasil atau tidaknya praktek pendidikan agama.²

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (pasal 3)

² A. Qodri Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), him. 143

Dengan demikian, Penanaman nilai antikorupsi tentu sangat relevan sebagai upaya edukatif mendidik generasi muda yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuan pokoknya, mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang. Asumsinya, peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Implementasi penanaman nilai di SMAN 03 Semarang, terutama penanaman nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Beberapa hal tersebut sesuai hasil observasi antara lain:

1. Pembelajaran di kelas

Penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui jalur pendidikan formal, yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar yang diselenggarakan melalui prasarana yang di lembagakan. Sekolah sebagai organisasi kerja terdiri dari beberapa kelas, baik yang bersifat paralel maupun berjenjang. Setiap kelas merupakan unit kerja yang berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai sub sistem yang menjadi bagian dari sebuah sekolah sebagai total sistem. Pengembangan sekolah sebagai total sistem atau satu kesatuan organisasi sangat tergantung pada penyelenggaraan dan pengelolaan kelas, baik lingkungan masing-masing sebagai unit kerja yang berdiri sendiri maupun dalam hubungan kerja antara kelas yang satu dengan yang lain.

Tugas guru dalam kelas adalah membelajarkan siswa dengan menciptakan kondisi belajar yang optimal, kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru dapat mengatur siswa. Sarana pelajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajarannya.

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Kondisi belajar tersebut dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling mempengaruhi, komponen - komponen itu misalnya tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan guru,

siswa, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana belajar mengajar yang tersedia.

Dengan demikian untuk menciptakan situasi yang kondusif demi untuk memperoleh hasil yang efektif dalam proses belajar mengajar tidaklah cukup ditunjang oleh penguasaan materi saja, tetapi guru juga harus mempunyai keterampilan dasar yang diharapkan akan dapat membantu dalam menjalankan tugas dalam interaksi edukatif. Keterampilan mengajar merupakan faktor dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, di antaranya adalah keterampilan pengelolaan kelas yang penting diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi murid atau anak didiknya.

Penanaman nilai terutama nilai anti korupsi melalui proses pembelajaran di kelas di SMAN 3 Kota Semarang, sebagian besar dilakukan oleh guru agama. Diantara materi yang disampaikan pada proses pembelajaran di kelas adalah membiasakan sifat-sifat terpuji, meneladani perilaku Nabi SAW, menghindari sifat-sifat tercela, membiasakan perilaku ikhlas, , dll., itu semua masuk materi PAI SMA dalam pokok pembahasan ; aqidah, akhlak, fiqih, Qur'an dan tarikh kebudayaan islam.³

Namun, tata nilai religius yang dilembagakan di sekolah idealnya mampu membentuk sikap dan perilaku individu warga, sekolah yang religius pula. Selanjutnya aktualisasi nilai religius mampu memproduksi masyarakat sekolah yang religius.

Guru agama merupakan motor penggerak pendidikan agama, karena dia adalah pribadi berakhlak yang dicerminkan dalam dirinya dengan disiplin tinggi, berwibawa, cerdas, gemar belajar, menguasai metode dan memiliki kepemimpinan. Dia harus tekun bekerja memeriksa semua penugasan kepada murid, sekaligus memberikan bimbingan, teguran. dan

³ Silabus MAPEL PAI Kelas X – XII SMAN 03 Semarang.

sanksi karena guru agama yang hanya datang untuk mengajar, tidak memiliki ikatan emosional dengan siswanya, tidak berwibawa, adalah awal kegagalan pendidikan agama di sekolah.⁴

Walaupun demikian, guru agama 4 orang tidaklah mempunyai cukup kesempatan untuk mendampingi peserta didik secara maksimal. Pada prakteknya, tugas mengajar yang dibebankan kepada seorang, guru agama secara umum hanya sembilan puluh menit. Waktu yang tersedia tidaklah cukup bagi guru agama untuk mengajarkan pelajaran agama sekaligus menanamkan nilai kepada para peserta didik.

Oleh karena itu, pembelajaran nilai agama sebenarnya tidak hanya harus dilaksanakan oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu, yang dalam hal ini guru agama. Pembelajaran tersebut idealnya dilakukan bersamaan dengan diajarkannya berbagai mata pelajaran di sekolah, karena masing-masing mata pelajaran juga mengandung nilai-nilai tertentu yang terkait, baik secara langsung maupun tidak, dengan agama.

Ibnu Miskawaih misalnya, sebagaimana yang dikutip oleh *Muhaimin*,⁵ menekankan pentingnya menuntut ilmu matematika, bukan hanya untuk membina kecerdasannya, tetapi agar si anak terbiasa dengan kejujuran, mampu menanggung beban pikiran, menyukai kebenaran, menghindari perbuatan batil dan membenci kebohongan. Nilai-nilai tersebut juga merupakan pesan pendidikan agama yang sekaligus dapat mencegah budaya korupsi.

Guru mata pelajaran ekonomi tidak hanya membina peserta didik agar mampu memahami asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan, tetapi juga membina mereka memiliki nilai-nilai hidup yang efisien dan manusiawi. Guru mata pelajaran IPA membina peserta didik agar

⁴ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Logos wacana Ilmu , 2004) hlm. 40

⁵ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam* (Jakarta : raja grafindo , 2006) hlm. 104

memiliki nilai-nilai hidup yang rasional-etik, guru mata pelajaran IPS mengembangkan dan inendidikkan nilai-nilai hidup sosial kekeluargaan, kemasyarakatan, persatuan, persaudaraan, dan lain-lain.

Semua nilai hidup yang disampaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran tersebut harus dikonsultasikan dengan nilai-nilai agama atau nilai ilahi sebagai nilai tertinggi yang bersumber dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, ia menjadi sumber atau pusat konsultasi dari mata pelajaran-mata pelajaran lainnya, karena pendidikan agama yang memuat nilai-nilai ilahi tersebut memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi daripada nilai-nilai hidup lainnya.⁶

Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Untuk tujuan pembinaan pribadian itu, maka hendaknya diberikan oleh guru yang benar-benar tercermin agama itu dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, cara berbicara, cara menghadapi persoalan dan dalam keseluruhan pribadinya.⁷

Dari sini jelas bahwa sebenarnya dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mengandung nilai-nilai yang dapat mencegah merebaknya budaya korupsi. Dengan demikian, upaya pembinaan nilai idealnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari guru pendidikan agama saja, tetapi para guru dan tenaga kependidikan lainnya juga ikut bertanggung jawab melalui upaya pembinaan nilai sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Pembelajaran di luar kelas

Proses pembelajaran yang menyenangkan adalah cara terbaik untuk mengajak anak didik belajar lebih baik. Proses pembelajaran itu bisa

⁶ *Ibid.* hlm. 184-185

⁷ Prof. DR. Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991), hlm. 107

dilakukan lewat sebuah permainan yang mendidik atau praktik langsung di lapangan dan dapat diterapkan pada hampir semua mata pelajaran. Bahkan, bukan tidak mungkin kita bisa menggabungkan dua mata pelajaran sekaligus dalam suatu pembelajaran. Misalnya antar pelajaran PAI dan Penjaskes. Misalkan saja pengamatan terhadap gerakan sholat. Dari sisi PAI bisa dipelajari mengenai syarat dan rukunnya sholat sedangkan dari sisi penjaskes di setiap gerakan sholat mengandung makna kesehatan bagi anggota tubuh.

Selain mengadakan pembelajaran rutin di dalam kelas (*classical class*), tak terkecuali pembelajaran di luar kelas (*outdoor class*) sering dilakukan oleh siswa SMAN 03 Semarang dengan dibimbing oleh guru. Seperti yang diungkapkan seorang guru : “Kami sering melakukan jam kelas di mushola, selain memperoleh suasana baru peserta didik juga dapat mempraktikkan teori yang dipelajari di dalam kelas seperti berwudlu, sholat, dll.”⁸

Peserta didik terlihat antusias dan asyik dalam melakukan tugas pengamatan dan mempraktikkan yang harus mereka lakukan, sementara guru dapat memberikan arahan dan bimbingan. Perlu disiapkan sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan *outdoor class* ini agar proses belajar mengajar nantinya bisa berjalan lancar, efektif, efisien dan tujuan pembelajaran tercapai sempurna.

Sedangkan, di kantin kejujuran SMAN 3 Kota Semarang ini para siswa ditanamkan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain serta memiliki kesadaran akan sesama. Melatih kejujuran dan. Kesadaran peserta didik ini terlihat pada aktifitas yang terjadi sehari-hari di kantin. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang peserta didik :

"Kita mengambil makanan sendiri, mbayar sendiri. Habis makan langsung bayar, ada yang besok baru bayar. Kalau ada yang bon dia nyatat

⁸ Hasil wawancara dengan guru Agama SMAN 3 Semarang ibu Ashomah, pada tanggal 15 Desember 2009

sendiri. Kalau mau bayar ya kita tinggal bilang, bu, kemarin kita makan ini dan ini, uangnya sekian, ini".⁹ Senada dengan peserta didik di atas diungkapkan oleh temannya, "Tidak apa-apa. Yang jelas membayar. Kasihan dong. Sudah ada keringanan, masak tidak dibayar".¹⁰

Salah seorang pengelola kantin mengatakan tentang peserta didik yang tidak membayar setelah makan, "Tentunya ada, pak. Mungkin karena lupa atau sengaja, tentu ada. Itu yang sulit pak. Bagaimana mungkin kita bisa mengamati sekian banyak pengunjung ini berapa gorengan yang dia makan misainya. Atau yang lainnya".¹¹

Dari beberapa kasus tersebut memang bisa diasumsikan bahwa kejujuran dan kesadaran peserta didik sudah terlatih, tapi ketika menghadapi kasus-kasus "kenakalan" tertentu, pengelola tidak memiliki cara yang tepat untuk mengatasinya. Karena pengelola tidak mempunyai cara untuk mengetahui secara pasti dan untuk mengatasi problem tersebut, maka pengelola pun tidak melaporkan problem itu ke pihak sekolah. Begitu juga, sekolah tetap memegang asumsinya bahwa perjalanan kantin kejujuran masih baik-baik saja, karena selama ini tidak ada keluhan atau laporan dari para pengelola kantin.

Dengan demikian, semua potensi yang ada di sekolah dapat bersinergi bersama dalam mendukung keberhasilan penanaman nilai agama, terutama nilai anti korupsi di SMAN 3 Kota Semarang melalui pembelajaran pendidikan agama islam.

⁹ Hasil wawancara dengan Eryana, siswa kelas XII-IPA SMAN 3 Semarang. 15 Desember 2009

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nadya, siswa kelas XII IPA SMAN 3 Semarang, 07 November 2009

¹¹ Wawancara dengan ibu Tri Ambawani pengelola kantin kejujuran di SMAN 03 Semarang pada tanggal 15 desember 2009

B. KENDALA IMPLEMENTASI PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PAI

1. Pembelajaran dalam kelas

a. Kurikulum

Kurikulum merupakan semua pengalaman belajar yang akan diperoleh anak guna mencapai tujuan perkembangan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum yang telah dirancang akan diimplementasikan di kelas. Ini berarti bahwa kelas bukan hanya tempat berkumpulnya anak dan guru melainkan lebih dari itu yaitu, suatu tempat berlangsungnya aktifitas pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian aktifitas pembelajaran yang terjadi di kelas dipengaruhi oleh kurikulum yang telah disusun.

Kurikulum adalah bagian terpenting dalam pembelajaran yang menjadi landasan berpijak setiap kali melakukan proses belajar mengajar akan tetapi dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah terdapat persoalan terkait dengan kurikulum, diantaranya : *pertama*, materi PAI mulai dari kelas X –XII di SMAN Semarang terlalu banyak sehingga murid belum bisa memahami, dan melaksanakan ilmu secara maksimal. *Kedua*, materi yang disuguhkan belum mengkhususkan pada pendidikan anti korupsi, sehingga pembahasan dan persoalan yang terkait dengan korupsi tidak seutuhnya.

Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak tiga peranan kurikulum yang sangat penting,

yakni peranan konservatif, peranan kritis/evaluatif dan peranan kreatif. Ketiganya sangat penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang.¹²

b. Guru

Proses pembelajaran moral di SMAN 03 Semarang terutama antikorupsi dilakukan juga di dalam kelas. Proses ini terutama dilakukan oleh guru agama, dengan jumlah jam yang hanya sembilan puluh menit dalam satu minggu, menjadi kesulitan tersendiri bagi pelaksanaan penanaman nilai antikorupsi.

Penanaman nilai anti korupsi idealnya didukung oleh semua potensi yang ada di sekolah. Dalam hal penyampaian nilai tersebut di kelas, semua guru mata pelajaran tentunya bisa menyampaikan nilai-nilai itu dalam perspektif mata pelajaran mereka masing-masing. Tentunya untuk mengambil nilai-nilai agama, yang sesuai dengan mata pelajaran tertentu, bisa dikomunikasikan dengan guru agama.

Kalau dihitung secara matematis berdasarkan jumlah jam tatap muka yang ada, memang guru agama tidak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk menanamkan nilai kepada peserta didik secara maksimal selain waktu yang relatif singkat, guru juga dihadapkan dengan lingkungan peserta didik yang dimungkinkan bisa menjadi salah satu faktor pendukung peserta didik melakukan tindakan asusila dan kriminal.

c. Peserta didik

Keberadaan peserta didik sangat penting guna menunjang suksesnya gerakan anti korupsi di sekolah, namun ada beberapa catatan yang membuat peserta didik sulit atau bahkan tidak menanamkan nilai anti korupsi dalam keseharian-nya, yaitu : *Pertama*, jumlah peserta didik yang banyak dengan karakter dan lingkungan berbeda. *Kedua*, waktu yang relatif sedikit di sekolah menjadikan peserta didik tidak maksimal

¹² Prof. DR. H. Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 11

dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. *Ketiga*, Lingkungan yang salah akan menjadikan peserta didik rawan dengan situasi dan kondisi yang fatal bagi proses kehidupannya. *Keempat*, konflik keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologis bagi peserta didik saat di sekolah. *Kelima*, faktor negatif dari program pembelajaran di sekolah, faktor negatif itu diantaranya ; a). Kelemahan pengajaran, b). Kurangnya komunikasi kelas., c). Hukuman yang diberikan oleh guru, d). Sikap guru yang negatif., e). Kurangnya bimbingan guru dan f). Kurikulum yang tidak mendukung.

Persoalan peserta didik yang sering muncul adalah ketika guru atau orang yang sekiranya dapat dijadikan suritauladan, ternyata melakukan tindakan yang melanggar di depan matanya yang menyebabkan ketidakpercayaan akan apa yang telah dikatakan guru tersebut kepadanya. Ini menyebabkan peserta didik melakukan tindakan – tindakan yang dilarang, misalnya minum-minuman keras, nge-PIL, tawuran, mencuri, dsb. Sehingga dampak yang jelas dari persoalan ini adalah peserta didik menjadi sosok yang dikucilkan baik dikalangan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

d. Media Pembelajaran

Upaya mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif akan dipengaruhi oleh ketersediaan dan keadaan sarana prasarana kelas serta segala fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas, diantaranya : a. Ruang kelas agama yang hanya ada 2 ruangan dengan peserta didik banyak menyebabkan proses belajar mengajar yang seringkali benturan jam. b. Ukuran ruangan yang terlalu kecil untuk ukuran peserta didik dengan jumlah kurang lebih 40-an anak. c. Kursi dan meja kelas yang sudah tua sehingga menyebabkan ketidaknyamanan waktu pembelajaran.

2. Pembelajaran di luar kelas

a. Kantin Kejujuran

Dalam pelaksanaan kantin kejujuran SMAN 03 Semarang bukan berarti tanpa kendala, dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan profesional untuk mencapai hasil maksimal. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai anti korupsi di kantin kejujuran SMAN 03 Semarang, khususnya terkait dengan fasilitas. seperti yang di ungkapkan salah seorang siswi :

“Kantin kejujuran cukup efektif dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, walaupun kadang saat evaluasi hasilnya ada yang minus, agar mendapatkan hasil yang maksimal fasilitas kantinnya harus dilengkapi lagi”¹³ Sistem pengelolaan kantin yang tidak secara langsung dilaksanakan oleh pihak sekolah menjadikan koordinasi pelaksanaan implementasi penanaman nilai anti korupsi menjadi kurang maksimal. Ini terbukti dengan tidak adanya hubungan struktural antara kantin dan sekolah. Tidak ada bagian yang secara khusus mempunyai kewenangan menangani kantin. Dengan kata lain, kantin tidak ada hubungannya dengan sekolah.

Dari sisi manajemen, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pelaksanaan suatu program. Apalagi yang terjadi biasanya pihak sekolah hanya akan berkoordinasi dengan pengelola kantin jika terjadi kasus-kasus tertentu, misalnya ada peserta didik yang nakal tidak mau membayar biaya makan kantin. Dipandang tidak menguntungkan karena yang terjadi selama ini pihak sekolah akan berkoordinasi dengan pengelola kantin jika terjadi masalah saja, sementara pihak pengelola kantin belum pernah melaporkan atau mengeluhkan masalah mereka.

¹³ Hasil wawancara dengan Nadya siswi kelas XII – IPA SMAN 03 Semarang, pada tanggal 07 November 2009

b. Peran keluarga

Pendidikan bukanlah urusan sekolah saja sedangkan keluarga angkat tangan yang pada gilirannya hanya menyalahkan sekolah ketika terjadi kegagalan pada anaknya. Masa depan anak-anak adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga.

Keluarga dari peserta didik kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah ke atas, yang notabene merupakan orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ini menyebabkan peserta didik kurang mendapatkan perhatian yang serius dari keluarganya, sehingga banyak anak yang lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga. Mereka hidup dengan dunia yang sekiranya dapat membuat peserta didik tersebut enjoy walaupun sebenarnya lingkungan masyarakat ada yang baik dan adapula yang buruk. Oleh karena itu, keluarga harus bisa kerjasama dengan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat untuk menciptakan generasi yang anti korupsi

C. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Generasi yang anti korupsi adalah tujuan daripada penanaman nilai anti korupsi di sekolah, agar penanaman nilai anti korupsi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan profesionalisme guru serta pengelolaan yang baik dan optimal segala fasilitas yang menunjang penanaman nilai anti korupsi, khususnya kantin kejujuran. Penanaman nilai agama, yang termasuk di dalamnya nilai anti korupsi, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. Guru-guru mata pelajaran lain hendaknya dilibatkan secara aktif dalam menanamkan nilai tersebut.

Keterlibatan potensi-potensi yang lain juga perlu diikutsertakan, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga mengenai peran keteladanan, semua guru bahkan semua potensi yang ada di sekolah seharusnya bisa dijadikan panutan oleh peserta didik. Pendidik atau guru harus bisa menjadi *uswatun hasanah* bagi peserta didik, karena mau tidak mau guru

akan menjadi panutan peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Jangan disalahkan ketika peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik/buruk ketika gurunya sendiri masih melakukan hal yang serupa. Guru selain menjadi pendidik harus bisa menjadi orang tua, sahabat dan teman bagi peserta didik, sehingga peserta merasa nyaman saat, diskusi, curhat atau sharing baik persoalan sekolah, keluarga maupun pribadi.

Berkaitan dengan mengelola kelas guru harus Pertama memiliki kemampuan untuk menata ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya aktifitas pembelajaran. Kedua mampu menciptakan iklim pembelajaran berdasarkan hubungan manusiawi yang harmonis. Dalam perannya sebagai pengelola kelas guru hendaknya mampu mengelola kelas dapat menjadi lingkungan yang baik untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

Lingkungan kelas yang baik untuk belajar ialah bersifat menantang dan merangsang anak untuk belajar, serta memberikan rasa aman dan kepuasan dalam pmencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan kemampuan guru dalam menciptakan iklim pembelajaran berdasarkan hubungan manusiawi berkaitan dengan bagaimana guru menampilkan peran sebagai orang dewasa yang profesional sehingga penampilannya menyenangkan bagi peserta didik.

Persoalan kurikulum yang diajarkannya pun perlu adanya evaluasi, materi PAI mulai dari kelas X –XII di SMAN Semarang terlalu banyak sehingga murid belum bisa menangkap ilmu secara maksimal, kemudian materi yang di suguhkan belum mengkhususkan pada pendidikan anti korupsi, sehingga pembahasan dan persoalan yang terkait dengan korupsi tidak seutuhnya. Oleh karena itu, materi khusus pendidikan anti korupsi harus direalisasikan walaupun tidak menjadi mata pelajaran baru dapat juga dijadikan sebagai integrat-kurikulum sehingga peserta didik dapat memahami secara detail tentang korupsi itu sendiri.

Perilaku mengganggu aktifitas dalam pembelajaran yang dimunculkan peserta didik perlu dipahami oleh seorang guru sebagai orang dewasa yang

profesional. Di samping itu, guru harus menyadari keunikan dari peserta didik yang berangkat dari basic yang berbeda sehingga memunculkan perilaku yang berbeda pula. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menjadi teman, sahabat sekaligus orang tua bagi peserta didik tersebut agar dapat mengontrol emosi yang muncul dalam sesaat dari peserta didik.

SMAN 3 Kota Semarang dalam pengelolaan kantin sekiranya perlu membentuk atau memberi kewenangan bidang yang sudah ada yang bertanggung jawab mengadakan koordinasi dan komunikasi secara langsung kepada pihak pengelola kantin. Hal ini agar komunikasi antara pengelola kantin dan sekolah berjalan lancar.

Pengelola kantin tidak merasa sungkan atau "ewuh pakewuh" untuk mengungkapkan keluhan-keluhannya pada sekolah. Koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan peresmian kantin kejujuran laboratorium pernebeajaran moral juga perlu diperjelas, agar peresmian tersebut tidak terkesan sekedar formalitas. Meskipun pada kenyataannya kebiasaan dan budaya yang ada di kantin, sudah terbangun lama sebelum ada peresmian. Ibaratnya tanpa diresmikan pun kantin di SMAN 3 Kota Semarang sudah menjadi "kantin kejujuran". Di samping itu, perhatian dalam bentuk monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam peresmian kantin kejujuran. Ini merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun institusional kenegaraan. Demikian juga, kesan lepas tangan begitu saja atau lepas tanggung jawab tidak akan dituduhkan kepada lembaga-lembaga tersebut.

Bentuk perhatian lain yang mungkin dilakukan lembaga-lembaga adalah berupa memberikan bantuan pengembangan kapasitas pengelolaan kantin kejujuran, baik kepada pihak pengelola kantin maupun pihak sekolah, berupa bantuan fasilitas atau penambahan modal. Bantuan tersebut sangat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kantin kepada para peserta didik.

Sekolah juga perlu melibatkan peran keluarga, dalam hal ini orang tua peserta didik untuk membantu merealisasikan penanaman nilai agama di

lingkungan keluarga mereka. Untuk mengatasi hal itu, sekolah perlu memanfaatkan kesempatan ketika para orang tua peserta didik dapat hadir di sekolah, seperti di awal atau akhir setiap tahun pelajaran. Karena, bagaimanapun program ini tidak hanya dimaksudkan untuk terlaksana di sekolah saja. Akan tetapi penanaman nilai ini bertujuan membekali peserta didik agar menjadi manusia yang jujur, manusia yang anti korupsi